



Sekda Kayong: Penyusunan APBD 2020 terancam Molor

Pergantian Dewan 2014-2019 ke 2019-2024

KAYONG UTARA, TRIBUN
 - Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani mengatakan, pergantian anggota DPRD dari periode 2014-2019 ke 2019-2024 akan sangat berdampak pada proses penyusunan APBD 2020, baik dari segi pembahasan maupun substansinya.

Hal itu disampaikan Hilaria saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Selasa, (23/7).

"Oleh karena itu, hal tersebut harus benar-benar dicermati, sehingga APBD 2020 dapat ditetapkan tepat waktu serta dapat fokus diarahkan pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan publik," kata Hilaria dalam rilis Humas Setda Kayong Utara ke-pada *Tribun*.



SOSIALISASI - Sekda Kayong Hilaria Yusnani membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Selasa, (23/7).

Hilaria menerangkan, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah. APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Perda.

Hilaria menegaskan tanpa adanya APBD yang baik dan berkualitas, tidak akan ada dasar pembiayaan untuk melaksanakan pelayanan publik, kesejahteraan sosial, pengelolaan sumber daya daerah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Harus kita sadari bahwa proses penyusunan APBD bersifat kompleks, karena selain menggunakan pendekatan teknokratis juga politis. Akan banyak kepentingan berbagai pihak didalam penyusunan APBD," kata Hilaria.

tas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya pendapatan, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan kualitas opini pemeriksaan BPK.

"Saya berpendapat, dengan berbagai regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya berorientasi ke-pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja," jelas Hilaria.

Pedoman penyusunan APBD, kata Hilaria, menjadi mutlak karena merupakan koridor yang harus menjadi acuan dan dipatuhi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. **(ade)**